

# Konsep Dasar Sistem Ekonomi

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Sc



## PENDAHULUAN

---

Modul ini membahas beberapa pengertian (konsep) mendasar perihal sistem perekonomian yang berkembang di dunia. Pada bagian awal dipaparkan pengertian sistem ekonomi yang selanjutnya akan diikuti dengan pembahasan perihal pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dalam memahami sistem ekonomi suatu negara, sekaligus bagaimana kedudukan sistem ekonomi tersebut dalam tatanan kehidupan sosial yang melingkupinya.

Pada bagian selanjutnya akan diperdalam pemahaman tentang mekanisme bekerjanya sistem ekonomi dengan menggunakan kerangka analisis unit-unit pelaku ekonomi yang terlibat di dalam setiap kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam hal ini akan dipaparkan bagaimana pola hubungan antarpelaku ekonomi yang terbentuk atau membentuk suatu sistem perekonomian tertentu. Sifat hubungan antarpelaku ekonomi dalam sistem ekonomi ini pada akhirnya akan mempengaruhi corak struktur ekonomi yang terbentuk pada suatu negara.

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu menjelaskan perihal konsep dasar sistem ekonomi dan mekanisme bekerjanya dalam kegiatan perekonomian suatu negara, khususnya dengan latar belakang kondisi negara seperti Indonesia. Indikator kompetensi setelah Anda mempelajari modul ini adalah Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam mengenali sistem ekonomi suatu negara.
2. Menjelaskan kedudukan sistem ekonomi dalam kaitannya dengan lingkungan material (alam) dan lingkungan sosial.
3. Menjelaskan mekanisme bekerjanya sistem ekonomi melalui peranan pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia.
4. Menjelaskan sifat dan pola hubungan antarpelaku ekonomi yang membentuk struktur ekonomi di suatu negara, khususnya Indonesia.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Konsep Sistem Ekonomi

## A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI

Menurut John F. Due (dalam Hamid, 2004: 35), sistem ekonomi merupakan “...*the group of economic institutions or regarded a unit of the economic system, the organization through the operation of which the various resources scarce, related to them are utilized to satisfy the wants man.*” Dalam pengertian lain, Theodore Morgan (*ibid* hal 35-36) menggambarkan sistem ekonomi sebagai “...*part of the constellation economic, social and political institutions and ideas and can be understood only as a part of this whole.*” Jadi ketika kita berbicara tentang sistem ekonomi, maka sama artinya kita sedang berbicara tentang segala aspek yang berkaitan dengan perilaku hidup dan kehidupan masyarakat.

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga (pranata) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, suatu sistem akan mempengaruhi pola berpikir dan pola bertindak pada masyarakat yang berada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma atau *value judgement* bagi masyarakatnya. Hak milik, rumah tangga, pemerintah, uang, pajak, bagi hasil, serikat buruh, semuanya merupakan contoh lembaga ekonomi.

Setiap kelompok masyarakat (pada tataran yang lebih kompleks membentuk negara bangsa) pasti memiliki sebuah sistem ekonomi untuk mengatasi beberapa persoalan, seperti; 1) barang apa yang seharusnya dihasilkan; 2) bagaimana cara menghasilkan barang itu; dan 3) untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut akan menentukan sistem ekonomi sebuah negara (Hudiyanto, 2002:11). Bagaimana suatu masyarakat (negara) mengatasi permasalahan ekonomi tersebut digambarkan oleh Gregory Grossmann dalam beberapa tipologi masyarakat (negara) yang berbeda satu sama lain.

Kehadiran suatu sistem adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan atau kondisi yang menjadi harapan bersama. Selain

sebagai penentu cita-cita (sebagai subjek), masyarakat juga merupakan elemen yang akan diatur oleh sistem (sebagai objek). Tujuan sistem yang dibentuk dihadirkan dari masyarakat atau dari pemikiran bersama. Ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan, sebelum membentuk suatu sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Keberadaan orang-orang sebagai anggota masyarakat dalam membangun sistem sangat penting, karena sistem yang dibentuk bukan hasil dari pemikiran perorangan atau hanya pemikiran sebagian golongan saja. Sistem yang hadir dari pemikiran sebagian kelompok memungkinkan dalam penerapannya nanti dilakukan dengan pemaksaan. Masyarakat yang tidak menyetujui sistem tersebut apalagi yang merasa menjadi golongan yang dirugikan akan menolak dengan berbagai cara, dan akibatnya adalah sistem yang dibentuk tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan akan tumbang sehingga tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Manusia sebagai subjek berperan penting baik sebagai pembentuk sistem atau juga sebagai pelaksana sistem. Sejalan dengan pemikiran ini adalah apa yang dikatakan Notonegoro (dalam Tjakrawerdaja, hal. 18, 2016) ketika membahas tentang Pancasila sebagai dasar ekonomi bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa? karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila (SEP, hal 18, 2016)

Orang yang hidup di Amerika Serikat membeli makanan dari suatu pertanian keluarga yang ditangani oleh grosir swasta, dan dijual oleh sebuah bahan makanan atau rangkaian toko yang berdiri sendiri. Semua aktor ekonomi melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan laba dan upah, yang diperoleh dengan cara menyediakan apa yang diperlukan dan bersedia dibayar oleh konsumen. Sementara itu, bahan makanan yang dibeli masyarakat Rusia mungkin ditanam pada pertanian negara atau pertanian kolektif. Bahan makanan itu diproses dan ditangani oleh perusahaan negara dan sangat mungkin dijual pada sebuah toko milik negara. Pekerja perorangan mendapatkan gaji untuk pekerjaan mereka, atau dalam hal petani kolektif menerima bagian dari jumlah laba bersih. Tetapi mereka melakukannya karena diarahkan oleh pemerintah dan perencanaannya secara terperinci (Grosmann, 2004: 1).

Di Yugoslavia, bahan makanan ditanam oleh petani yang bebas menanam apa yang mereka inginkan. Hasil tanaman mereka dijual dan disalurkan oleh perusahaan sosial di mana pekerja dan wakil-wakilnya menentukan apa dan bagaimana memproduksinya tanpa suatu perintah langsung dari pengusaha. Mereka melakukan itu untuk mencari laba yang sebagian besar masuk ke kantong mereka sendiri yang mereka peroleh dengan memenuhi permintaan konsumen di pasar, sama halnya dengan yang

dilakukan perusahaan Amerika. Sebagian besar penduduk masih memperoleh makanan dari ladang keluarga sendiri atau sawah, atau ternak, tanpa perantara pihak ketiga.

Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang diyakini oleh negara. Ideologi tertentu akan melahirkan sistem ekonomi tertentu pula karena pada dasarnya, negara melalui ideologinya telah memiliki cara pandang tertentu untuk memandang dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Setiap sistem ekonomi membutuhkan sekumpulan peraturan, ideologi yang mendasarinya, menjelaskan peraturan tersebut dan keyakinan individu yang akan membuatnya terus dijalankan (Robinson, 1962:18). Dengan kata lain, sistem ekonomi yang dibentuk merupakan rumusan dari ideologi yang telah tertanam secara kuat dalam jangka waktu yang lama dari suatu kumpulan masyarakat atau yang lebih luas yaitu suatu bangsa. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Bung Karno, sistem ekonomi yang dibentuknya dengan nama Sistem Ekonomi Pancasila, bukan karangan atau yang ia bentuk dari hasil pemikirannya sendiri, akan tetapi lahir dari bangsa Indonesia. Sebagai kaum berpendidikan, Bung Karno hanya merumuskan saja dari elemen-elemen yang ia temukan kemudian dituangkan dalam suatu rumusan baku menjadi suatu sistem ekonomi. (Tjakrawerdaja, hal 13, 2016).

Perumusan sistem ekonomi tidak diawali dengan pemilihan atau mempelajari sistem sosial ataupun sistem kapitalis, akan tetapi lebih kepada pengaruh sistem sosial budaya nasional yang ditopang oleh budaya lokal. Dari sanalah mulai dibentuknya sistem ekonomi. Dari rumusan dasar tersebut kemudian mengambil sistem sosialis atau sistem kapitalis untuk menjadi dasar pengembangannya. Ini yang banyak terjadi di suatu masyarakat atau suatu negara. (Tjakrawerdaja, hal 22, 2016)

Sistem yang dibentuk kemudian akan menjadi dasar bagaimana subjek ontologis (manusia) itu akan bertindak dan berperilaku. Dan jika semua anggota masyarakat mampu menggerakkan sistem tersebut maka tujuan masyarakat atau secara khusus tujuan dari sistem tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk tercapai dimasa yang akan datang. Negara Indonesia baik dalam mendukung terwujudnya pemerintahan demokratis dalam mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia. (Tjakrawerdaja, hal 19, 2016).

Ada berbagai sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Namun, pada dasarnya kita dapat membaginya menjadi dua titik ekstrim, yaitu Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. Pada perkembangannya, ketika banyak negara merasa kedua sistem tersebut tidak dapat menjawab

persoalan-persoalan mereka, maka muncul Sistem Ekonomi Campuran yang menggabungkan kedua sistem ekonomi sebelumnya.

Perbedaan mendasar dalam memilih sistem ekonomi negara adalah karena perbedaan cita-cita ekonomi dan cara mewujudkannya. Sistem ekonomi dibangun dari empat komponen (sub-sistem) utama, yaitu (i) tatanan tentang kepemilikan; (ii) tatanan pelaku/partisipan; (iii) tatanan tentang proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dan, (iv) tatanan tentang tujuan yang hendak dicapai. Hal ini berbeda dengan apa yang disebut dengan teori ekonomi, karena teori ekonomi berarti bahwa petunjuk atau kaidah praktis untuk menjelaskan gejala ekonomi, sehingga teori ekonomi bersifat universal. (Tjakrawerdaja, hal 107, 2006). Ideologi negara yang bebas menghasilkan sistem ekonomi liberal, ideologi negara yang sosialis menghasilkan sistem ekonomi dengan peran pemerintah dominan, sedangkan negara yang sangat *tolerant* dan demokratis sangat mungkin memiliki sistem ekonomi campuran.

Pada bagian selanjutnya akan dibahas pendekatan sistem ekonomi yang akan menjadi pijakan teoritik selanjutnya

## 1. Pendekatan Sistem Ekonomi

Pendekatan dalam sistem ekonomi ditentukan oleh kriteria hasil yang dicapai dalam perekonomian, mekanisme pengatur, bentuk hak milik, dan motivasi berekonomi.

### a. Kriteria hasil yang dicapai

Sistem perekonomian tertentu membuahkan hasil yang mungkin berbeda dengan sistem yang lain, tergantung dari sejauh mana masalah perekonomian mendasar dapat dipecahkan. Kriteria hasil yang dicapai dalam perekonomian yang dikaitkan dengan berlakunya suatu sistem ekonomi tertentu di antaranya meliputi (Grosman, 2004: 4-16):

#### 1). Kelimpahan (*abundancy*)

Berdasarkan kondisi ketersediaan faktor-faktor produksi, baik melimpah maupun langka, maka dapat diketahui bagaimana sistem ekonomi telah menghasilkan produksi barang dan jasa tertentu, apakah melimpah atau kekurangan.

#### 2). Pertumbuhan (*growth*)

Tingkat produksi barang dan jasa dapat diketahui perubahannya setiap tahun, apakah tumbuh, stagnan, atau mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi secara berbeda pada berbagai sistem ekonomi yang berlainan.

### 3) Stabilitas

Gejolak ekonomi dunia yang ditengarai sebagai siklus konjungtur berimbas pada instabilitas makro berupa tingkat harga, kesempatan kerja, dan stagnasi industri. Kondisi instabilitas akan berbeda tergantung bagaimana sistem perekonomian suatu negara (masyarakat) dapat merespon dan mengantisipasinya.

### 4) Keamanan

Keamanan ini terkait dengan kepastian dalam berbagai kondisi dan kegiatan ekonomi yang mampu diselenggarakan oleh suatu sistem perekonomian tertentu. Konsep yang dimunculkan adalah seperti halnya sistem jaminan sosial yang mengeliminasi dampak gejolak sosial-ekonomi bagi masyarakat luas seperti halnya resiko sakit, cacat, dan kematian kepala rumah tangga.

### 5) Efisiensi

Penggunaan sumber daya yang tersedia (tenaga kerja, bahan baku, dan mesin) untuk memperoleh hasil yang optimal biasanya dikaitkan dengan suatu pilihan sistem ekonomi tertentu dalam tataran mikro. Pada tataran makro, efisiensi perekonomian terkait dengan hakikat harga, pengambilan keputusan, tingkat persaingan, struktur pajak, yang dipengaruhi oleh lembaga perekonomian.

### 6) Pemerataan dan Keadilan (persamaan)

Pemerataan disini mengandung pengertian kesempatan yang diberikan oleh suatu sistem perekonomian bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan menikmati hasil-hasilnya secara adil. Hasil produksi ini dapat berupa pendapatan, kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

### 7) Kemerdekaan Ekonomi

Kemerdekaan ekonomi merupakan prasyarat sekaligus hasil yang diperoleh suatu masyarakat (negara) dengan sistem perekonomian tertentu. Kemerdekaan disini mencakup berbagai kemungkinan kemerdekaan untuk memilih pekerjaan, untuk berusaha, dan berbagai bentuk kemerdekaan masyarakat sebagai konsumen yang lain.

#### 8) Kedaulatan Ekonomi

Kedaulatan ekonomi melingkupi kedaulatan rumah tangga pemilik sumber produksi, kedaulatan konsumen, atau kedaulatan pimpinan (pemerintah) yang ketiga-tiganya dapat mempengaruhi keputusan produksi yang menjadi bagian penting suatu sistem perekonomian.

#### 9) Perlindungan Lingkungan

Salah satu aspek penting sistem perekonomiannya adalah dampak kegiatan pelaku ekonominya terhadap kondisi lingkungan hidup (alam). Ada sistem ekonomi yang cenderung merusak lingkungan karena semata-mata mengejar keuntungan ekonomi pribadi. Namun ada juga sistem ekonomi yang begitu protektif (konservatif) terhadap lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakatnya.

#### *b. Mekanisme Pengatur*

Suatu sistem perekonomian yang berhasil mensejahterakan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh lancarnya koordinasi kegiatan jutaan unit individu dan kelompok yang terdapat di dalamnya. Mekanisme pengatur dalam hal ini diperlukan untuk melancarkan hubungan antarpelaku ekonomi yang terpisah tetapi saling tergantung. Mekanisme pengatur ini diperlukan untuk mengkoordinasi cara produksi dan cara alokasi yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga mekanisme untuk melakukan koordinasi seperti itu yaitu tradisi, mekanisme pasar, dan komando.

#### 1) Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang dijadikan acuan dalam pola hubungan khusus yang tertentu di antara unit atau agen ekonomi. Tradisi menjadi suatu mekanisme untuk mengatur pembagian kerja dan pembagian manfaat dan beban dalam masyarakat. Kelebihan tradisi adalah dapat diramalkannya hubungan dan pola kebiasaan, sekaligus menghilangkan keharusan untuk melakukan renegotiasi transaksi satu per satu, sementara pada saat yang sama menghindarkan unsur paksaan yang tidak menyenangkan yang sering dikaitkan dengan komando. Kekurangannya adalah lambatnya menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah seperti inovasi teknologi, produk baru, selera baru, dan pengertian keadilan dan kewajaran yang berubah, jika tradisi berusaha menyesuaikan.

## 2) Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar bekerja dalam satu perekonomian dengan tiga syarat: 1). Setiap unit ekonomi memutuskan apa, bagaimana, dimana, ketika mereka menghasilkan dan mengkonsumsi. 2). Mereka melakukan ini sebagian besar dengan berpegang pada pilihan yang tersedia untuk mereka dengan berpatokan pada harga dalam arti yang seluas-luasnya. 3). Harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan masing-masing barang yang akhirnya akan diperoleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan dan koordinasi kegiatan ekonomi dari jutaan unit atau agen ekonomi.

## 3) Komando

Dalam hal ini masing-masing kesatuan ekonomi (meskipun hanya unit usaha dan bukan rumah tangga) diperintahkan untuk mengkonsumsi apa, bila, dimana, bagaimana caranya, dan berapa banyak. Jika dijalankan secara rasional semuanya, komando-komando ini (petunjuk, perintah, target, rencana) berasal dari suatu usaha yang sadar (“perencanaan”) untuk mengkoordinasi kegiatan masing-masing unit dan untuk mengarahkan perekonomian secara keseluruhan menuju sasaran tertentu.

### *c. Bentuk Hak Milik*

Pengakuan terhadap hak milik menentukan sistem perekonomian suatu negara. Keleluasaan individu untuk memiliki aset (kekayaan) dan faktor produksi umumnya dijumpai dalam masyarakat yang menganut paham kapitalistik. Hal berkebalikan dijumpai bagi masyarakat yang dinaungi paham komunis di mana kepemilikan aset dan faktor produksi berada pada institusi negara. Sistem perekonomian negara-negara tersebut, dalam hal apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi ditentukan juga pada basis kepemilikan tersebut. Pada umumnya kepemilikan dapat diletakkan pada basis individual, kolektif (masyarakat), dan pemerintah (negara). Perbedaan pada basis kepemilikan ini akan menentukan sistem ekonomi suatu negara yang berbeda pula.

## **2. Kedudukan Sistem Ekonomi**

Fungsi yang strategis sistem ekonomi terdiri dari dua hal, yaitu: (a) Sistem ekonomi berperan dalam menjaga dan menjalankan perekonomian, dan (b) Sistem ekonomi merupakan sarana untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. (Tjakrawerdaja, hal 108, 2016). Pembahasan kedudukan Sistem Ekonomi dalam kehidupan manusia dapat dilakukan dengan menelaah hubungan sistem perekonomian dengan sistem alam (lingkungan material), sistem sosial-masyarakat, dan sistem pemikiran (ilmu) ekonomi.

a. *Sistem Ekonomi dan Lingkungan Alam (material)*

Arus utama pemikiran ekonomi (neoklasik) yang mendominasi perekonomian dunia terlalu menitikberatkan pada pelaku sosial (*social sphere/anthropocentric*) dengan mendiskusikan persoalan yang terkait dengan nilai keputusan (*value decisions*), tingkah laku pelaku ekonomi (*economic actors/agents*) dan mekanisme pasar (*market mechanism*). Namun, para pemikir ekonomi neoklasik sering lupa atau bahkan melupakan diri bahwa distribusi kesejahteraan yang dihasilkan dari pasar itu berasal dari *hardsphere* atau dunia material alias ekosistem alam, lingkungan dan sistem biosphere.

Namun demikian, penafikan peran ekologi sesungguhnya tidak ditemukan dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pada abad 18 misalnya, seorang intelektual Perancis bernama Quesnay telah lama memfokuskan diri pada keterkaitan antara penggunaan radiasi matahari oleh organisme biotik terhadap kesejahteraan manusia melalui produksi pertanian. Sementara itu, pada jaman ekonomi klasik, para pemikir besar seperti Adam Smith (1937), David Ricardo (1891) dan Karl Marx (1906) telah membahas peran dunia fisik (*materialism*) dalam distribusi kesejahteraan. Selain itu, Cleveland and Ruth (1997) juga menyebutkan peran penting beberapa peneliti biologi dan fisika abad 19 dan awal abad 20 seperti Podolinsky, Geddes, Soddy, dan Hoghen dalam beberapa isu ekonomi.

Singkat kata, pengingkaran fenomena alam oleh aliran neoklasik –yang notebene menggantikan aliran klasik- pantas disebut sebagai kecelakaan sejarah (Hill, et.al, 2001). Kontributor terbesar dari *mis-displacement* menurut Hill, et.al (2001) adalah superioritas matematik dan perkembangan teori marjinal utiliti di dalam aliran neoklasik di mana keduanya mampu memecahkan paradoks *water vs diamond* sementara aliran klasik tidak. Konsekuensinya, banyak keputusan publik yang dihasilkan banyak menggunakan model-model matematik yang memuaskan (*sophisticated*) namun mengabaikan atau setidaknya kurang memperhatikan berlakunya hukum alam. Dengan kata lain, pemikiran neoklasik meletakkan alam sebagai bagian dari sistem ekonomi, yang diwujudkan dalam ikon internalisasi atau problem eksternalitas.

Sedangkan pemikiran yang berkembang kemudian adalah bahwa ekonomi sebagai wujud dari *human households* sesungguhnya merupakan bagian dari ekosistem besar (*whole of ecosystem*) sehingga senantiasa ada batas (*steady-state economy*). Hal ini mengakibatkan beberapa kebijakan yang dihasilkan hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*) sehingga berpotensi mengancam prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan (Andrianto, 2004: 2).

*b. Sistem Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat (sosial)*

Seperti halnya pengetahuan manusia merefleksikan alam (yang merupakan materi yang berkembang), yang keberadaannya tidak tergantung dari manusia, begitu pula *pengetahuan sosial* (berbagai pandangan dan doktrin yang dihasilkan manusia: filosofi, agama, politik, dan seterusnya) merefleksikan *sistem ekonomi* dari masyarakat. Berbagai lembaga politik merupakan superstruktur di atas fondasi ekonomi. Sebagai contoh, bahwa berbagai bentuk politis dari negara-negara Eropa modern memperkuat dominasi pihak kapitalis terhadap pihak proletariat. Realitas ini memberi gambaran bagaimana bangunan politik merepresentasikan sistem ekonomi yang dominan dalam suatu masyarakat (negara). Lingkungan sosial (masyarakat) pun dapat pula merupakan hasil konstruksi dengan latar belakang sistem ekonomi tertentu. Bagaimana anggota masyarakat memenuhi kebutuhan mereka akan mempengaruhi pola hubungan sosial antaranggota masyarakat.

Jika para ahli ekonomi kapitalis melihat hubungan antar-benda (pertukaran antar-komoditi), Marx memperhatikan *hubungan antar-manusia*. Pertukaran komoditi mencerminkan hubungan-hubungan di antara para produser individual yang terjalin melalui pasar. *Uang* memperlihatkan bahwa hubungan itu menjadi semakin erat, yang tanpa terpisahkan menyatukan seluruh kehidupan ekonomi dari para produser. *Modal* (kapital) memperlihatkan suatu perkembangan lanjutan dari hubungan ini: tenaga kerja manusia menjadi suatu komoditi. Para pekerja upahan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik tanah, pemilik pabrik dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk menutup biaya hidupnya dan keluarganya (mendapat upah), sebagian yang lain waktu kerjanya digunakan tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkan nilai lebih untuk para pemilik modal. Nilai lebih merupakan sumber keuntungan, sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal (Lenin, 1913: 4). Dengan begitu, pola hubungan antarmanusia, yang merefleksikan lingkungan sosial (masyarakat) turut dipengaruhi oleh bagaimana sifat pola hubungan antarpelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (proses produksi dan alokasinya).

Kedudukan sistem ekonomi juga terkait dengan model perekonomian yang diterapkan dalam suatu negara tersebut. Suatu negara yang menutup diri dengan hubungan ekonomi luar akan berbeda dengan negara yang membuka diri seluas-luasnya dengan ekonomi luaran dalam hal peranan (kedudukan) sistem ekonomi dalam menentukan corak perekonomian negara tersebut.

Model sistem perekonomian dapat dikategorikan menjadi dua model yaitu model perekonomian tertutup dan model perekonomian terbuka (Chandra, 2004: 2-3).

### 3. Model Perekonomian Tertutup

Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.

Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya. Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional kita. Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempurna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan *the invisible hand*. Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen.

Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini. Guna menetralsisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi

melakukan koreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan, penenaan tarif atau pelarangan-pelarangan yang diberlakukan pada ketiga pelaku ekonomi utama ini. Bank Indonesia, misalnya dapat melakukan kegiatan monitoring dan pengaturan manajemen perbankan nasional secara umum dengan mengeluarkan ketentuan tentang *prudential banking practices*. Protes atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan pengusaha sering dilontarkan oleh Lembaga Konsumen, khususnya tidak dipenuhinya *standart performances* dan kualitas atas barang atau jasa ditawarkan ke konsumen.

#### 4. Model Pertekonomian Terbuka

Pada sistem ekonomi yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, seperti kreditor swasta luar negeri dan lembaga keuangan internasional, seperti *Asia Development Bank* (ADB), *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF). Terakhir kita dihadapkan lagi pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (*the borderless economy*) yang disebut dengan *the global economy*, dimana bentuk dan sepek terjangnya belum kita mengerti secara utuh.



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Apakah tujuan dibentuknya sistem ekonomi? Bagaimanakah proses terbentuknya sistem ekonomi dalam suatu negara?
2. Berikan gambaran kedudukan manusia dalam proses pembentukan sistem ekonomi?
3. Jelaskan berbagai pendekatan yang dapat menjadi dasar pembeda sistem ekonomi yang diterapkan di suatu negara?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

1. Baca materi mengenai pengertian sistem ekonomi dan proses terbentuknya.
2. Baca materi tentang kaitan keberadaan manusia dan sistem ekonomi.
3. Baca materi tentang system ekonomi yang dianut suatu negara.

**RANGKUMAN**

---

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga (pranata) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ekonomi untuk mengatasi beberapa persoalan, seperti; 1) barang apa yang seharusnya dihasilkan; 2) bagaimana cara menghasilkan barang itu; dan 3) untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut akan menentukan sistem ekonomi sebuah negara. Pendekatan dalam sistem ekonomi ditentukan oleh kriteria hasil yang dicapai dalam perekonomian, mekanisme pengatur, bentuk hak milik, dan motivasi berekonomi.

Kriteria hasil yang dicapai dalam perekonomian yang dikaitkan dengan berlakunya suatu sistem ekonomi tertentu di antaranya meliputi kelimpahan, pertumbuhan, stabilitas, keamanan, efisiensi, pemerataan dan keadilan, kemerdekaan ekonomi, kedaulatan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Di sisi lain, terdapat terdapat tiga mekanisme untuk melakukan koordinasi seperti itu yaitu tradisi, mekanisme pasar, dan komando. Sistem perekonomian negara-negara ditentukan juga pada basis kepemilikan tersebut, yaitu pada basis individual, kolektif (masyarakat), ataukah pemerintah (negara).

Pemikiran neoklasik meletakkan alam sebagai bagian dari sistem ekonomi, yang diwujudkan dalam ikon internalisasi atau problem eksternalitas. Pengetahuan sosial (berbagai pandangan dandoktrin yang dihasilkan manusia: filosofi, agama, politik, dan seterusnya) merefleksikan sistem ekonomi masyarakat. Dengan begitu, berbagai lembaga politik merupakan superstruktur di atas fondasi (supra-struktur) sistem ekonomi. Model sistem perekonomian dapat dikategorikan menjadi dua model yaitu model perekonoman tertutup dan model perekonomian terbuka.

**TES FORMATIF 1** \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

1. Penerapan sistem ekonomi tidak memecahkan masalah .....
  - A. apa barang yang diproduksi
  - B. berapa banyak barang yang diproduksi
  - C. untuk siapa barang diproduksi
  - D. bagaimana barang diproduksi
  
2. Kriteria hasil yang dikaitkan dengan berlakunya suatu sistem ekonomi tertentu tidak dicapai dengan.....
  - A. efisiensi
  - B. kedaulatan ekonomi
  - C. produktivitas
  - D. stabilitas
  
3. Aliran pemikiran ekonomi yang meletakkan alam sebagai bagian dari sistem ekonomi, yang diwujudkan dalam ikon internalisasi atau problem eksternalitas adalah .....
  - A. Klasik
  - B. Neoklasik
  - C. Merkantilis
  - D. Strukturalis
  
4. Menurut Marx, yang dimaksud dengan supra-struktur atau pondasi yang membentuk bangunan di atasnya, adalah .....
  - A. sistem politik
  - B. sistem moral
  - C. sistem ekonomi
  - D. filsafat pengetahuan
  
5. Model perekonomian yang memungkinkan produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain adalah perekonomian .....
  - A. terbuka
  - B. tertutup

- C. terkendali
- D. pasar bebas

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

**Rumus:**

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

- 90 - 100% = baik sekali
- 80 - 89% = baik
- 70 - 79% = cukup
- < 70% = kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Akan tetapi, apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Mekanisme Bekerjanya Sistem Ekonomi

## A. PELAKU-PELAKU EKONOMI

Pelaku ekonomi merupakan elemen penting yang membentuk bangunan sistem ekonomi. Bagaimana pelaku ekonomi tersebut melakukan kegiatan ekonominya, baik dalam berproduksi, alokasi (distribusi), maupun berkonsumsi akan menentukan sistem perekonomian tersebut. Berbagai kegiatan ekonomi yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi yang berbeda takan memunculkan pola hubungan yang memiliki sifat (karakteristik) tertentu. Aditiawan Chandra menekankan bahwa ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:

- *Produsen atau Pengusaha*, yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memproduksi barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
- *Konsumen*, yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (*human wants*) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
- *Lembaga Perbankan dan Keuangan*, merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
- *Badan Publik dan Pemerintah*: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.

Pelaku-pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis (bidang) dan sektor perekonomian tertentu. Misalnya dalam sektor usaha pertanian, maka dapat dipetakan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian tersebut di antaranya adalah buruh tani, petani pemilik tanah, perantara (pengumpul), perusahaan (korporasi) pertanian, lembaga keuangan (bank dan non bank), pemerintah, dan konsumen. Dalam lingkup mikro, pelaku ekonomi dalam suatu perusahaan industri misalnya adalah meliputi buruh, manajemen, pemegang saham, lembaga keuangan, pemerintah, dan konsumen. Keterkaitan antarpelaku ekonomi dan bagaimana bentuk dan sifat hubungan antara mereka membentuk susunan tertentu (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang menentukan sistem ekonomi yang berkembang suatu negara.

## **B. POLA HUBUNGAN ANTARPELAKU EKONOMI**

Sistem ekonomi dapat dipahami juga sebagai kesatuan hubungan antarpelaku ekonomi yang membentuk suatu pola dan sifat tertentu. Pola ini dapat berupa pola hubungan yang emansipatoris (setara/setimbang) maupun sub-ordinatif ( timpang). Pola emansipatoris cenderung bersifat saling memberdayakan, sedangkan pola hubungan sub-ordinatif cenderung bersifat eksploitatif atau bahkan predatoris.

Mekanisme bekerjanya sistem ekonomi yang bersifat emansipatoris (setara) antarpelaku ekonominya misalnya saja dapat diindikasikan dengan contoh sebagai berikut: Warga desa menggunakan teknologi mikro hidro untuk sumber energi listrik di wilayah mereka dan sebagian dapat dijual kepada perusahaan listrik negara dengan harga yang jauh lebih rendah (karena biaya produksi mikrohidro juga jauh lebih murah) dibanding biaya produksi perusahaan tersebut. Hasil penjualan dikelola koperasi desa yang selanjutnya digunakan untuk membangun sosial-ekonomi warga desa tersebut. Dari ilustrasi ini dapat digambarkan bagaimana kemandirian warga desa (rumah tangga produksi) telah mampu membantu perusahaan pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati kedua belah pihak.

Pola hubungan ekonomi yang timpang (bersifat eksploitatif dan sub-ordinatif) contoh paling mudah adalah terjadi melalui penjajahan (kolonialisme) ekonomi satu negara ke negara lain atau penghisapan satu pelaku ekonomi besar (kuat) ke pelaku ekonomi kecil (lemah), sebagai contoh seperti halnya yang dialami oleh petani perdesaan yang tetap saja miskin walaupun telah menopang ekonomi perkotaan, dengan ilustrasi mekanisme berkerjanya sebagai berikut:

Kesejahteraan petani sampai hari ini tidak meningkat secara signifikan. Harga produk pertanian anjlok, harga pupuk mahal, dan harga kebutuhan hidup makin tinggi. Produk murah mereka adalah hasil paksaan sistem ekonomi yang masih mengandalkan tingkat upah buruh yang rendah. Buruh (kota) menikmati sedikit surplus perusahaan sehingga daya beli mereka disangga oleh harga murah produk sektor informal (ekonomi rakyat). Artinya, petani kita (ekonomi rakyat) telah mensubsidi korporat raksasa, ekonomi perdesaan mensubsidi ekonomi perkotaan. Sebuah sistem dan pola hubungan (dialektik) ekonomi yang timpang, tidak adil, dan eksploitatif terhadap ekonomi rakyat di perdesaan.



Gambar 1.1  
Pola Hubungan Ekonomi Eksploitatif di Indonesia

Gambar di atas menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi rakyat, semisal petani kecil dan buruh tani di perdesaan, yang berada pada posisi sub-ordinan dan menikmati surplus ekonomi yang sangat minimal karena sebagian besar justru mengalir ke pemodal besar, pemerintah, perantara, dan pihak asing (melalui pembayaran utang LN dan repatriasi surplus modal asing).

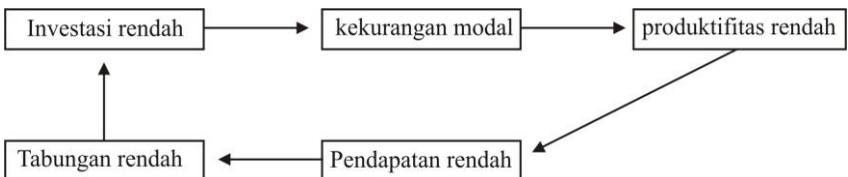
Hal ini memungkinkan terjadi bila petani kecil menjual produknya dengan harga murah ke tengkulak, membayar pajak dan pungutan lain yang membebani usahanya, dan memenuhi kebutuhan korporasi pangan dengan kontraprestasi sangat minimal. Terlebih lagi jika aset-aset di sekitar mereka sudah banyak yang dikuasai pemodal asing atau pemerintah yang tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran mereka. Dalam jangka panjang, surplus ekonomi yang dinikmati petani kecil dan buruh tani makin

mengecil dibandingkan surplus ekonomi yang dinikmati petani besar, tuan tanah, birokrat/elit desa, pemodal besar, rentenir, dan tengkulak. Seperti tercermin dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.2.  
Surplus ekonomi yang dinikmati pelaku ekonomi

Implikasi pola hubungan ekonomi yang eksploitatif ini adalah struktur dan sistem ekonomi yang timpang, yang akhirnya memunculkan kemiskinan struktural seperti dialami petani miskin di perdesaan yang tidak lagi banyak menguasai aset dan faktor produksi (sumber ekonomi). Sistem ekonomi inilah yang menopang berlangsungnya lingkaran kemiskinan, di mana petani yang penguasaan sumber ekonominya rendah maka kemampuannya akan rendah sehingga ia menjadi miskin. Kemiskinan yang terjadi karena kesenjangan pendapatan dalam masyarakat sehingga ada perbedaan akses untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Berbagai kebijakan dan sistem ekonomi yang diterapkan selama ini tidak mampu menjawab persoalan tersebut yang tercermin dari makin besarnya angka kemiskinan. Masalah kemiskinan yang tiada habisnya menurut Ragnar Nurkse disebabkan oleh lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*):



Gambar 1.3  
Lingkaran setan kemiskinan

Dari Gambar di atas bisa dilihat ada bentuk hubungan yang tidak berujung pangkal, tidak jelas mana sebab dan mana akibat. Setiap bagian bisa jadi menjadi sebab sekaligus menjadi akibat. Lingkaran setan inilah yang membuat kita sulit menanggulangi kemiskinan secara tuntas. Kemiskinan tersebut telah bersifat sistemik dan struktural sehingga cara-cara memberantasnya juga harus melalui pola-pola sistemik dan struktural. Di sinilah relevansi (perlunya) sistem ekonomi yang terbangun dalam suatu masyarakat atau negara. Ia bisa menjadi sumber masalah ekonomi (kemiskinan sistemik), namun ia juga dapat dibangun untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut secara mendasar melalui revolusi sistem perekonomian.

### **Ilustrasi Kasus Pola Hubungan Antar Pelaku Ekonomi SISTEM EKONOMI KOLONIAL DI INDONESIA\***

Awan Santosa

Sejarah ekonomi bangsa Indonesia lekat dengan eksploitasi dan subordinasi oleh bangsa lain. Ekonomi rakyat Indonesia pun kenyang “diperkuli” dan dijadikan sapi perahan ekonomi besar, baik dari kalangan bangsa sendiri, dan terutama dari bangsa asing. Keluar dari hisapan kongsi dagang monopolis VOC, ekonomi rakyat Indonesia dijerat sistem tanam paksa (cultuurstelsel-1830) yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda untuk memenuhi kebutuhan komoditi mereka (Eropa). 40 tahun kemudian (1870), giliran perusahaan swasta Belanda (asing) yang menguasai perkebunan kita melalui pemaksaan sistem kapitalis-liberal. Indonesia diperlakukan sebagai onderneming besar dan penyedia buruh murah bagi pasar luar negeri. Ekonomi rakyat (pribumi) tetap sebagai kuli.

Bangsa Indonesia adalah bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa lain. Status-quonis inilah yang digugat Sukarno. Hatta pun bertekad keras bangsa ini harus menjadi tuan di negeri sendiri. Bagi mereka, merdeka berarti merdeka secara politik dan ekonomi. Untuk itu, pasca kemerdekaan perlu adanya reformasi sosial guna menghapus pola hubungan ekonomi yang timpang, eksploitatif dan sub-ordinatif terhadap ekonomi rakyat Indonesia. Namun, naluri untuk menghisap dan memperkuli bangsa lain (dan bangsa sendiri!) ternyata tetap (selalu?) ada. Atau karena juga kita yang begitu soft dan mudahnya dibodohi, dihisap dan diperkuli. Yang jelas, berurusan dengan sumber daya strategis Indonesia memanglah menggiurkan, sehingga tarik-

menarik kepentingan merupakan hal yang masuk akal.

Naiknya rezim Orba pasca “krisis politik-ekonomi” yang menjatuhkan rezim Orla, pun tak lepas dari tarik-menarik ini. Paling tidak itulah yang digambarkan John Pilger dalam bukunya *The New Rulers of The World* (2002) perihal “kaplingisasi” kekayaan ekonomi Indonesia di era 67-an. Agenda ini dimuluskan melalui Konperensi Jenewa (1967) yang berakhir dengan kesepakatan di mana Freeport menguasai gunung tembaga di Papua, Konsorsium Eropa berhak atas nikel di Papua Barat, Alcoa mendapat tambang bouksit, dan Korporat Amerika, Perancis, dan Jepang kebagian hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua, dan Kalimantan. Birokrat berkolaborasi dengan korporat (pemodal asing) menguasai faktor (dan mode) produksi. Kulinisasi pun berlangsung kembali. Ekonomi rakyat-lah yang lagi-lagi menanggung beban, diperkuli, dimiskinkan.

Reformasi bergulir dalam koridor liberalisasi yang dipaksakan IMF dan Bank Dunia. Wajah politik kita memang berubah. Tapi arus besar yang kita ikuti masih sama : globalisme-pasar bebas. Mulailah era penggusuran terhadap daulat rakyat berganti menjadi era daulat pasar. Satu demi satu aset-aset strategis dijual ke pihak asing melalui skema privatisasi (rampokisasi?). Konstitusi-pun direka-ulang demi maksud ini. Pasal 33 (penjelasan) UUD ‘45 dihapus total, dus demokratisasi ekonomi dikedirikan, koperasi pun direduksi hakekatnya. Muaranya adalah beralihnya tampuk produksi dari negara ke korporat, sama sekali bukan ke rakyat banyak (masyarakat). Pola produksi dan konsumsi nasional pun makin dibentuk oleh kebebasan (kekuatan) pasar internasional, sehingga tidak lagi menerima prioritas (pengutamakan) kepentingan nasional.

Pasar bebas inheren dengan kepentingan korporat dan negara maju untuk menegakkan korporatokrasi yang menelikung peran ideal pemerintah dan masyarakat. Bangsa kita digiring untuk sekedar menjadi bangsa konsumen (menikmati produk murah-sesaat) atau paling banter menjadi “bangsa makelar” (menjual produk asing-impor), yang melupakan upaya membangun industri nasional dan kewirausahaan berbasis ekonomi rakyat dan sumber daya lokal. Parahnya lagi ketika bangsa kita kembali hanya akan menjadi bangsa kuli yang tunduk dan melayani kepentingan pihak (bangsa) asing. Kita terus saja mengejar nilai tambah ekonomi, dan melupakan pentingnya nilai tambah sosial-kultural berupa kokohnya ideologi, budaya, martabat bangsa.

Pemerintahan dan teknokrat ekonomi SBY-Kalla pun masih tersandera oleh paradigma dan kebijakan ekonomi rezim-rezim sebelumnya. Mereka tetap saja bicara dan mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan investasi skala besar (asing). Persis yang dipikir dan dikejar rezim Orba yang maunya

direformasi. Pemerintah lebih sigap menyediakan infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan korporat besar, termasuk giat mengembangkan basis-basis produksi berskala besar, ketimbang secara konsisten menerapkan agenda-agenda demokratisasi ekonomi (pemberdayaan ekonomi rakyat). Pasar rakyat berhadapan dengan maraknya pembangunan super-mall, sementara investasi oleh ekonomi rakyat dipandang sebelah mata karena silaunya pada investasi asing.

Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang terperangkap dalam jebakan utang (debt-trap) sehingga dipaksa memenuhi agenda-agenda negara (lembaga) kreditor. Dan kita pun baru saja tahu lewat pengakuan John Perkins dalam bukunya *Confessions of an Economic Hit Man* (2004) bahwa semua itu terjadi melalui disain sistematis pemerintah (korporat) asing (AS) untuk ikut menguasai dan mengatur perekonomian Indonesia di era 70-an. Ceritanya tetap sama, Indonesia adalah negara kaya sumber daya strategis dan buruh murah yang menarik untuk dihisap dan diperkuli. Maka, utang pun disodor-sodorkan untuk membiayai proyek-proyek yang mereka kerjakan demi mengejar impian indah masa itu : pertumbuhan ekonomi melalui investasi skala besar (asing), sampai kemudian utang lama terpaksa dibayar dengan membuat utang-utang baru.

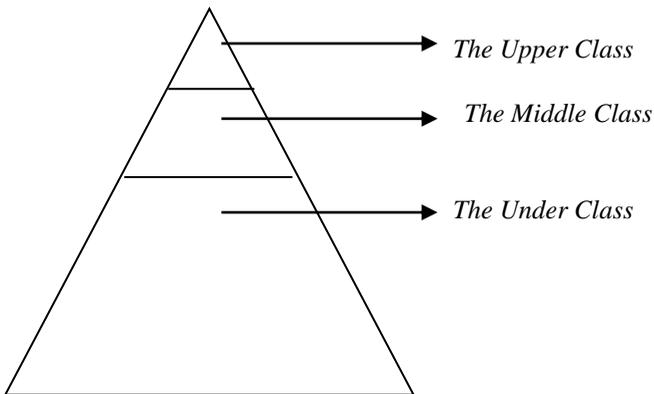
Kulinisasi kini makin dikukuhkan oleh pendidikan yang terlalu pro-pasar, yang semata-mata memposisikan peserta didik sebagai alat produksi pemasok pasar tenaga kerja. Pun, pendidikan ekonomi kita berkembang dalam kultur hegemoni oleh ajaran-ajaran ekonomi Barat yang sarat kepentingan kaum fundamentalis pasar (neo-liberalisme), sehingga bias usaha besar-modern dan abai dengan masalah dan real-life economy yang dihadapi oleh mayoritas pelaku ekonomi rakyatnya sendiri.

Hasilnya tentu bukan manusia didik yang peka dan paham potensi dan masalah ekonomi rakyat-nya, berjiwa enterprenuer, dan sadar martabat dan harga diri bangsa, melainkan lulusan-lulusan yang tidak percaya diri, opportunistis, serta mudah dihisap dan diperkuli. Kita berebutan masuk pasar tenaga kerja yang korporatnya sudah banyak dikuasai oleh korporat (bangsa) asing. Kulinisasi oleh bangsa asing yang berlangsung lama itu pun telah menumbuhkan persistensinya inferiority complex bangsa kita, suatu budaya hidup yang tidak cerdas, penuh rasa minder, ketertundukan dan kekaguman kepada yang serba Barat dan asing. Dengan makin lunturnya nasionalisme, maka hubungan subordinasi ini hidup kembali dan sekaligus makin memperpuruk bangsa Indonesia (Swasono, 2004)

\*(dikutip dari [www.awansantosa.blogspot.com](http://www.awansantosa.blogspot.com))

### C. STRUKTUR SOSIAL-EKONOMI

Sistem ekonomi yang terbangun dalam suatu negara akan memunculkan tatanan sosial ekonomi yang menempatkan pelaku-pelaku ekonomi dalam struktur sosial-ekonomi tertentu. Struktur ekonomi ini diikuti dengan kekuasaan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda pada setiap pelaku ekonomi. Struktur ekonomi yang umum digunakan adalah pemilahan ke dalam kelompok ekonomi atas (*upper class*), kelompok ekonomi menengah (*middle class*), dan kelompok ekonomi bawah (*under class*). Dalam kasus negara berkembang termasuk Indonesia, maka jumlah mereka yang berada di kelompok atas lebih sedikit dibanding yang berada pada kelompok menengah dan bawah. Oleh karena itu, struktur ekonomi masyarakat digambarkan dalam bangun piramida.



Gambar 1.4  
Struktur Ekonomi

Kecenderungan umum yang terjadi karena struktur ekonomi terkait dengan kekuasaan dan kemampuan ekonomi-politik maka mereka yang masuk dalam kelompok atas meskipun jumlahnya sedikit namun menguasai dan menikmati banyak surplus perekonomian nasional. Hal yang berkebalikan menempa kelompok ekonomi bawah yang jumlahnya mayoritas namun menguasai dan menikmati hasil produksi dalam taraf yang sangat minimal. Gambaran riil perihal struktur ekonomi dapat diilustrasikan melalui hasil observasi Hatta yang memetakan struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda ke dalam tiga golongan besar:

- 1) Golongan Atas, yang terdiri dari bangsa Eropa (khususnya Belanda) yang menguasai dan menikmati hasil penjualan komoditi pertanian dan perkebunan di negeri jajahan mereka.
- 2) Golongan menengah, yang 90% terdiri dari kaum perantara perdagangan, khususnya dari etnis Tionghoa (China), yang mendistrubisikan hasil-hasil produksi masyarakat jajahan ke perusahaan besar dan ekonomi luaran. Dalam kelompok ini terdapat 10% bangsa Indonesia yang mampu menguasai dan menikmati hasil perekonomian karena mempunyai kekuasaan (jabatan) tertentu (elit), itu pun berada di posisi paling bawah pada lapisan ini.
- 3) Golongan bawah, yang terdiri dari massa rakyat pribumi yang bergerak pada perekonomian rakyat, yang tidak mampu menguasai dan menikmati hasil-hasil produksi mereka karena berada dalam sistem ekonomi kolonialis.

Demikian jelas kiranya, sifat hubungan antarpelaku ekonomi yang terbangun dari suatu sistem ekonomi akan berimplikasi pada terwujudnya struktur ekonomi tertentu. Dalam hal ini peranan masing-masing pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian, terutama dalam kepemilikan faktor produksi dan menikmati hasil produksinya, akan menentukan bagaimana wujud struktur ekonomi tersebut.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan kerjakan latihan berikut!

1. Jelaskan keterkaitan antara pelaku-pelaku ekonomi dengan sistem ekonomi yang terbentuk dalam suatu negara!
2. Jelaskan hubungan antara sistem ekonomi dan struktur ekonomi!
3. Jelaskan sifat hubungan ekonomi eksploitatif-subordinatif yang dialami bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

1. Baca materi tentang kaitan pelaku ekonomi dengan sistem ekonomi.
2. Baca materi tentang kaitan sistem ekonomi dan struktur ekonomi.
3. Baca materi mengenai sifat hubungan ekonomi ekspresif - subordinatif



Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama. Pelaku ekonomi utama terdiri dari produsen, konsumen, pemerintah (badan publik), dan lembaga keuangan. Dalam sektor pertanian, misalnya pelaku ekonominya adalah buruh tani, petani pemilik tanah, perantara (pengumpul), perusahaan (korporasi) pertanian, lembaga keuangan (bank dan non bank), pemerintah, dan konsumen. Keterkaitan antarpelaku ekonomi dan bagaimana bentuk dan sifat hubungan antara mereka membentuk susunan tertentu (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang menentukan sistem ekonomi yang berkembang suatu negara.

Pola hubungan antarpelaku ekonomi dapat berupa pola hubungan yang emansipatoris (setara/setimbang) maupun sub-ordinatif ( timpang). Pola emansipatoris cenderung bersifat saling memberdayakan, sedangkan pola hubungan sub-ordinatif cenderung bersifat eksploitatif atau bahkan predatoris. Implikasi pola hubungan ekonomi yang eksploitatif ini adalah struktur dan sistem ekonomi yang timpang, yang akhirnya memunculkan kemiskinan struktural seperti dialami petani miskin di perdesaan yang tidak lagi banyak menguasai aset dan faktor produksi (sumber ekonomi).

Relevansi (perlunya) sistem ekonomi yang terbangun dalam suatu masyarakat atau negara adalah ia bisa menjadi sumber masalah ekonomi (kemiskinan sistemik), namun ia juga dapat dibangun untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut secara mendasar melalui revolusi sistem perekonomian. Sistem ekonomi yang terbangun dalam suatu negara akan memunculkan tatanan sosial ekonomi yang menempatkan pelaku-pelaku ekonomi dalam struktur sosial-ekonomi tertentu. Struktur ekonomi yang umum digunakan adalah pemilahan ke dalam kelompok ekonomi atas (*upper class*), kelompok ekonomi menengah (*middle class*), dan kelompok ekonomi bawah (*under class*).



## TES FORMATIF 2

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

1. Pelaku ekonomi di lingkungan internal sebuah perusahaan perseroan swasta bukan merupakan .....
  - A. pemegang saham
  - B. *chief of organization*
  - C. buruh
  - D. grosir
  
2. Pedagang pengumpul yang membeli hasil panen petani dengan harga rendah dan menjualnya ke pasaran dengan harga jauh lebih tinggi termasuk dalam kategori pola hubungan antarpelaku ekonomi yang bersifat di bawah ini, kecuali .....
  - A. sub-ordinatif
  - B. eksploitatif
  - C. predatori
  - D. emansipatori
  
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan penduduk di suatu negara yang terjadi karena adanya kondisi .....
  - A. sistem ekonomi yang bias pemodal besar
  - B. struktur ekonomi yang timpang
  - C. kemalasan ekonomi rakyat untuk berkembang
  - D. monopoli teknologi oleh korporasi internasional
  
4. Salah satu contoh pola hubungan antar pelaku ekonomi yang membentuk sistem ekonomi yang timpang atau bias ekonomi besar adalah hubungan antara .....
  - A. VOC dan petani Jawa
  - B. pedagang kecil dan BRI
  - C. buruh dan Serikat Pekerja
  - D. petani dan Koperasi Unit Desa
  
5. Struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda (1930-an) yang berbentuk piramida secara berurutan dari posisi teratas hingga terbawah adalah .....
  - A. perantara (Tionghoa)-Bangsa Eropa-Massa Pribumi

- B. massa Pribumi-Bangsa Eropa-Perantara (Tionghoa)
- C. bangsa Eropa-Perantara (Tionghoa)-Massa Pribumi
- D. bangsa Eropa-Raja Jawa-Massa Pribumi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

**Rumus:**

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

- 90 - 100% = baik sekali
- 80 - 89% = baik
- 70 - 79% = cukup
- < 70% = kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Akan tetapi, apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) B
- 2) C
- 3) B
- 4) C
- 5) A

### *Tes Formatif 2*

- 1) D
- 2) D
- 3) C
- 4) A
- 5) C

## Daftar Pustaka

- Adrianto, Luki, (2002) *Reformasi Pemikiran Ekonomi: Perlunya Re-integrasi Ilmu Alam dengan Ilmu Ekonomi*, artikel dalam [www.google.com](http://www.google.com) Arief, Sritua, 2006, *Negeri Terjajah*, Yogyakarta, Resist Book Candra, Aditiawan, (2000) *Bagaimana Membaca Perekonomian Makro*, artikel dalam [www.google.com](http://www.google.com)
- Deliarnov. (1995). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Utama. Gregory Stuart. (1982). *Comparative Economic System*. Boston. Grossmann, Gregory, (1986), *Sistem Ekonomi*, Jakarta, Bumi Aksara Hamid, Edy Suandi. (2005). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamid, Edy Suandi. (2004). *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press.
- Hudiyanto. (2004). *Ke luar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme*. Yogyakarta: UMY Press.
- Hudiyanto. (2001). *Ekonomi Indonesia: Sistem dan Kebijakan*. Yogyakarta: PPE UMY.
- Lenin, (1913), Tiga Sumber dan Tiga Komponen Marxisme, *Collected Works*, Volume 19, pp. 23-28. Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPF. Mubyarto. (2000). *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Robinson, Joan. (1979). *Aspects of Development and Underdevelopment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tjakrawerdaja, Subiakto dkk. (2016). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Trilogi.